



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut RUPM DIY merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPM DIY menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 2

- (1) RUPM DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
 - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) Promosi Penanaman Modal.

e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal DIY yang terdiri dari:

- 1) Fase I: Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk Proyek-proyek Strategis dan Proyek-proyek yang sudah dirancang;
- 2) Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri Besar, dan Sektor-sektor Lain yang Diprioritaskan;
- 3) Fase III: Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).

f. Pelaksanaan.

- (2) RUPM DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPM DIY dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Kabupaten/Kota.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menyusun RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 6.

- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Gubernur untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu komponen, di samping konsumsi, belanja pemerintah, dan net ekspor, yang menentukan pertumbuhan perekonomian. Investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda yang luas.

Kondisi umum penanaman modal di DIY belum menunjukkan hasil yang optimal. Padahal, berdasarkan RPJP DIY tahun 2005-2025, visi pembangunan DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkannya. Kerjasama pemerintah dan swasta (*Public-Private Partnership*) merupakan prinsip dasar dalam pembiayaan investasi pengembangan DIY, untuk mewujudkan Visi DIY tahun 2025.

Untuk menarik penanaman modal ke DIY diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi. RUPM DIY merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJP DIY 2005-2025 dan sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada RUPM Nasional, RUPM DIY menetapkan 3 (tiga) sektor prioritas nasional, yaitu pangan dan hasil bumi, infrastruktur, dan energi, sebagai prioritas DIY. Ketiga sektor tersebut merupakan isu besar yang menjadi tantangan di masa depan sehingga ketiganya harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Selain 3 (tiga) sektor tersebut, RUPM DIY menetapkan 3 (tiga) sektor prioritas daerah, yaitu kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif yang merupakan sektor unggulan di DIY. Khusus untuk pengembangan penanaman modal di sektor pariwisata, RUPM DIY mengacu pada Perda No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (Ripparda) DIY.

Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut juga perlu diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga kabupaten/kota yang senjang dalam penanaman modal dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di DIY. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah.

Dalam RUPM DIY juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif untuk menarik penanaman modal yang strategis sesuai dengan tujuan Pemerintah DIY. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang dilaksanakan secara terfokus, terarah, dan efektif.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM DIY juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di DIY berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005-2025, maka visi penanaman modal DIY sampai tahun 2025 adalah **“Penanaman modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan dan pertumbuhan investasi di sektor-sektor unggulan, yang *‘pro-growth’*, *‘pro-job’*, dan *‘pro-poor’*.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di DIY, SKPD teknis/sektor terkait, dan pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di DIY dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di DIY.
- 3) Peningkatan koordinasi antarlembaga/instansi di DIY dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.
- 4) Peningkatan peran lembaga penanaman modal DIY untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di DIY.

b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya.

- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 4) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (level playing field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di DIY. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu

diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan.
- c. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.
- e. Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kabupaten/kota dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten/Kota di DIY.

3. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif

a. Pangan dan Hasil Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan hasil bumi adalah untuk mewujudkan kontribusi DIY dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan (*seed centre*) terkemuka di Indonesia dan dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat perbenihan (*seed centre*) di beberapa kawasan potensial di DIY.
- 2) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang perbenihan.

- 3) Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah.
- 4) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

b. Infrastruktur

Sasaran pengembangan infrastruktur adalah pengembangan bandara baru di DIY dan infrastruktur pendukungnya, pengembangan kawasan industri, dan pengembangan infrastruktur di kawasan-kawasan pengembangan pariwisata.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1) Pengembangan bandara baru dan infrastruktur pendukungnya.
- 2) Pengembangan kawasan industri baru.
- 3) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 12 (dua belas) kawasan, yaitu:
 - a. Kawasan Merapi bagian selatan dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Godean- Moyudan dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya;
 - f. Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya;
 - g. Kawasan pantai Baron - Sundak dan sekitarnya;
 - h. Kawasan Siung - Wediombo - Bengawan Solo Purba dan sekitarnya;
 - i. Kawasan Patuk dan sekitarnya;
 - j. Kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya;
 - k. Kawasan Congot - Glagah – Trisik dan sekitarnya; dan
 - l. Kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya.
- 4) Pengembangan infrastruktur jalan, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
- 5) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan bandara baru dan infrastruktur pendukungnya, kawasan industri, kawasan pengembangan pariwisata, dan infrastruktur jalan.

c. Energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di DIY dan tersedianya energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di DIY dan Indonesia.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan.
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di DIY dan sumber energi terbarukan.

d. Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam RIPPARDA DIY 2013-2025 (Perda No. 1 Tahun 2013).

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi DTW.
- 2) Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan.
- 3) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada DTW yang telah ada dan dalam pembangunan DTW baru.

e. Pendidikan

Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di DIY yang berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan:

- 1) Pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing DIY sebagai pusat pendidikan.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing DIY sebagai pusat pendidikan.

f. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.

- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sesuai dengan Misi RPJMD 2012-2017 yaitu untuk menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, maka Pemerintah DIY perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif

Penanaman Modal, sesuai yang ditetapkan dalam Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.

- b. Peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan citra (*image building*) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) DIY disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: pembangunan bandara baru dan fasilitas pendukungnya, kawasan-kawasan peruntukan industri (Sentolo dan Piyungan), infrastruktur jalan (Jalur Jalan Lintas Selatan), pelabuhan (Tanjung Adikarto), proyek penyediaan air bersih (Bribin), dan lain-lain.

Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan daya tarik wisata baru, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan. Proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya meliputi: Baron Technopark, Kawasan Kotagede, Kawasan Titik Nol, Kawasan Maguwo-Embung Tambakboyo-Candi Gebang, dan lain-lain.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.
2. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
3. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten/kota yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Merintis kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
6. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.

7. Meningkatkan citra positif DIY sebagai daerah tujuan investasi.

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan
(2015-2019) dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri Besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur besar yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan industri besar. Infrastruktur skala besar yang menjadi fokus pada Fase II ini adalah bandara baru, kawasan-kawasan industri, kawasan pengembangan pariwisata, dan pelabuhan laut dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
2. Penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
4. Memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial

Fase III : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan
(2020-2025) Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*)

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi,

terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi DIY dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh DIY.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
2. Pemantapan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent-worker*).
4. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif *penta-helix*, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
5. Mendorong kerjasama penta-helix untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
6. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan DIY menjadi daerah yang ramah lingkungan.

F. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan sinkronisasi dan sinergitas RUPM DIY dengan RUPM Kabupaten/Kota, peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi dan *monitoring* dan *evaluation* (monev), dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dan Sinergitas RUPM DIY dengan RUPM Kabupaten/Kota:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPM DIY dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Kabupaten/Kota.
 2. RUPM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 3. Dalam penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY.
- b. Peningkatan Iklim Penanaman Modal:
- Gerai P2T meningkatkan pelayanan perizinan dengan mengoptimalkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal di DIY.
- c. Peningkatan Koordinasi dan Monev:
1. BKPM DIY memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda DIY mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
 2. SKPD dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di DIY dengan mengacu pada RUPM.
 3. Seluruh SKPD terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
 4. BKPM DIY bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
 5. BKPM DIY melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam fasilitasi realisasi penanaman modal di DIY. BKPM DIY memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur dan memberikan *feedback* kepada Gubernur atas hasil koordinasi dan upaya lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD.
 6. Bappeda DIY mengevaluasi kinerja BKPM DIY dalam melakukan promosi penanaman modal dan memimpin upaya realisasi penanaman modal dengan menggunakan target kinerja penanaman modal seperti yang telah ditetapkan dalam RPJM DIY.
 7. Gubernur DIY memimpin upaya koordinasi dan sinergi dalam promosi, fasilitasi perizinan, dan realisasi penanaman modal dengan kabupaten/kota.
- d. Peningkatan upaya promosi penanaman modal
- BKPM DIY menjadi *leading sector* dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di DIY dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

VISI

Penanaman Modal yang mendukung terciptanya DIY pada 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

MISI

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah
3. Mendorong pemerataan dan pertumbuhan investasi di sektor-sektor unggulan, yang 'pro-growth', 'pro-job', dan 'pro-poor'.

KEBIJAKAN

1. Memperbaiki iklim penanaman modal.
2. Mendorong pesebaran penanaman modal.
3. Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal (hasil bumi, infrastruktur, energi, kebudayaan & pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif).
4. Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*).
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK
6. Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.
7. Meningkatkan promosi penanaman modal.

FASE I (2014-2015)							
No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2014	2015	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan <u>fasilitasi perizinan</u>	X	X	BKPM	P2T dan Institusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap <u>direalisasikan</u>	X		BKPM	P2T dan Institusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek2 yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah2 terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X		BKPM	Bappeda, Dinas PU & ESDM, Pemkot/Pemkab
		Peningkatan koordinasi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	BKPM	Pemkot/Pemkab, Badan Pertanahan Nasional
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	BKPM	Pemkot/Pemkab, Tokoh-tokoh masyarakat, LSM
2	Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota yang <u>siap dipasarkan</u>	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peluang strategis <u>investasi di Kabupaten/Kota</u>	X	X	BKPM	Bappeda, Dinas PU & ESDM, Pemkot/Pemkab
		Identifikasi kebutuhan fasilitasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	Melaksanakan koordinasi dan indentifikasi permasalahan/hambatan realisasi peluang investasi strategis di <u>Kabupaten/Kota</u>	X	X	BKPM	Bappeda, Dinas PU & ESDM, Pemkot/Pemkab
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Sosialisasi fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang tersedia sesuai Perda DIY No 4/2013	Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Perda No.4/2013 kepada calon investor	X	X	BKPM	KADIN
		Koordinasi aktif dengan instansi terkait, Pemkab/Pemkot untuk merealisasikan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	X	X	BKPM dan Bappeda	Pemkab/Pemkot, Institusi Perizinan, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan material promosi peluang investasi yang <u>direalisasikan dalam jangka pendek</u>	Menyusun prospektus berdasarkan masterplan	X		BKPM	Bappeda
		Promosi peluang investasi secara tepat sasaran	Melaksanakan business meetings dengan calon-calon investor <u>yang tepat</u>	X	X	BKPM	KADIN dan P2T

Fase II: Tahun 2015-2019

FOKUS: PANGAN dan HASIL BUMI

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi dan yang terkait	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan, yaitu pengolahan hasil pangan dan hasil bumi dan perbenihan	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan
			Menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PTSP dengan mendapatkan pelimpahan wewenang perizinan bidang pangan dan hasil bumi dari Gubernur	x						BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor pangan dan hasil bumi	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan sektor pangan.	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
		Land banking yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan
		Pengembangan kebutuhan sarana/prasana pendukung investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan hasil bumidan yang terkait	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan,Dinas PU & ESDM, Pemerintah Kabupaten/Kota< KADIN
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	x			x			Bappeda dan BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda, PemKab/Kota, KADIN
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM,PemKab/Kota, KADIN
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi dan hasil bumi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			BKPM	BKPM, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, PemKab/Kota, KADIN
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pangan dan hasil bumi yang berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pangan dan hasil bumi yang berdaya saing tinggi	x			x			BKPM	Bappeda, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, PemKab/Kota, KADIN
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan klaster bidang pangan dan hasil bumi yang berdaya saing tinggi	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota, KADIN

3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi (hulu - hilir, jenis komoditas, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait, terutama yang meliputi: <i>seed center</i> dan pengolahan hasil pangan dan hasil bumi	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota, KADIN
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Bappeda, PemKab/Kota, KADIN
			Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			Dinas Pertanian, Pekebunan,	BKPM, Institusi LH
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan dan hasil bumi besar dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan dan hasil bumi besar dengan UMKMK	x		x		x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Disperindagkop & UKM
			Pengembangan peluang investasi bidang pangan dan hasil bumi yang bisa dikelola oleh koperasi	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Disperindagkop & UKM
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	x		x				BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait	x		x				BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pertanian		x	x	x	x		BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait		x	x	x	x		BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN

FOKUS: INFRASTRUKTUR

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin penanaman modal di bidang infrastruktur	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur dan bidang usaha yang terkait, terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur , terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan, Kantor Pertahanan

		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor infrastruktur.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan sektor infrastruktur.	x						BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan, KADIN
		Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi di sektor-sektor fokus yang lain	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di sektor-sektor yang lain	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur.	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
		Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sektor infrastruktur dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
		Pengembangan klaster wilayah dengan kebutuhan investasi sektor infrastruktur di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pengembangan daya saing wilayah yang diprioritaskan.	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan sektor infrastruktur yang berdaya saing tinggi.	x	x	x	x	x	x	BKPM dan Bappeda	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur (terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur dan yang terkait.	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan.	x			x			Dinas PU & ESDM	BKPM, LH, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan
			Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.	x			x			Dinas PU & ESDM	BKPM, LH, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif untuk <i>green investment</i> dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot.	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan, LH
		Pemberian pengakuan publik untuk investor di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	BKPM, LH, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di sektor infrastruktur yang menyerap/memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di sektor infrastruktur dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten/Kota
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor investasi	x		x				BKPM	Institusi Perizinan, Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten/Kota

		Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i> , terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor investasi dan yang terkait	x		x				BKPM	Dinas PUP & ESDM, Dinas PUP & ESDM, KADIN
			Mengikuti pameran investasi di sektor infrastruktur		x	x	x	x		BKPM	Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan, KADIN
			Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di sektor infrastruktur dan yang terkait		x	x	x	x		BKPM	Dinas PUP & ESDM, Dinas Perhubungan, KADIN

FOKUS: ENERGI

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang energi dan yang terkait	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang energi dan yang terkait	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor energi.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan sektor energi.	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Bappeda, KADIN
		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk pengembangan sektor energi dan bidang usaha yang terkait	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk pengembangan sektor energi dan bidang usaha yang terkait	x		x		x		BKPM	Kantor Pertahanan, Kabupaten/Kota, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi dan yang terkait	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas PU & ESDM
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas PU & ESDM
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait	x			x			BKPM	Bappeda, Kabupaten/Kota
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Kabupaten/Kota, Dinas PU & ESDM
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			Bappeda	BKPM, Kabupaten/Kota
		Pengembangan kluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi yang berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi yang berdaya saing tinggi	x			x			Bappeda	BKPM, Kabupaten/Kota
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kluster bidang energi yang berdaya saing tinggi	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Kabupaten/Kota
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang energi (hulu - hilir, keterkaitan antarindustri, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha energi dan yang terkait	x			x			BKPM	Kabupaten/Kota, Bappeda
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman pengembangan investasi energi alternatif yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan pengembangan investasi bidang energi alternatif yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Kabupaten/Kota, Bappeda, LH
			Menyusun mekanisme money untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	Kabupaten/Kota, Bappeda, LH

		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi dalam pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, LH, Kabupaten/Kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	LH
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk pengembangan energi yang melibatkan UMKM atau menyerap tenaga kerja lokal, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Kabupaten/Kota
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di bidang energi dan energi alternatif yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, LH, Kabupaten/Kota
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor energi dan bidang usaha yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor energi dan yang terkait	x		x				BKPM	Kabupaten/Kota, Bappeda
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor energi dan yang terkait	x		x				BKPM	KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang investasi energi		x	x	x	x		BKPM	KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang energi dan yang terkait		x	x	x	x		BKPM	KADIN

FOKUS: KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan.	x	x	x	x	x	x	BKPM dan Bappeda	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Land banking yang tersedia untuk bidang usaha pariwisata	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun DTW baru	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Badan Pertanahan
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanaan untuk pengembangan investasi sektor kebudayaan dan pariwisata.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanaan untuk pengembangan sektor energi.	x			x			BKPM	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha kebudayaan dan pariwisata.	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan DTW baru, DTW berbasis kebudayaan, atau meningkatkan daya saing DTW yang telah ada.	x			x			Dinas Pariwisata	BKPM, Bappeda, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)

		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata sesuai Perda no. 1/2013 (Ripparda)	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan yang terkait di kawasan pengembangan pariwisata	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi, sesuai Perda no. 1/2013 (Ripparda)	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata yang berdaya saing tinggi di kawasan pengembangan pariwisata	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan strategis pariwisata	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan strategis pariwisata	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment).	Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata, Disperindagkop & UKM
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata besar dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dengan UMKMK	x		x		x	x	Dinas Indagkop	BKPM, Dinas Pariwisata, Pokdarwis
			Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata yang bisa dikelola oleh koperasi/pokdarwis	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas Indagkop, Pokdarwis
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Kab/Kota, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	x		x		x		BKPM	Dinas Pariwisata
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata		x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait		x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata

FOKUS: PENDIDIKAN

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry.	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan investasi sektor pendidikan.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan sektor pendidikan.	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora, KADIN

		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun usaha di bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora, Kantor Pertanahan
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x			x			Bappeda	BKPM, Dikpora
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dikpora, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x			x			Bappeda	BKPM, Dikpora
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry, isata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dikpora
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			BKPM	Dikpora
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang usaha yang terkait industri pendidikan dan knowledge-based industry	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang usaha yang terkait industri pendidikan/knowledge-based industry yang berdaya saing tinggi	x			x			BKPM	Dikpora
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dikpora
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang usaha yang terkait industri pendidikan dan knowledge-based industry (hulu - hilir, jenis usaha, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x			x			Bappeda	BKPM, Dikpora
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment).	Penyusunan pedoman bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Dikpora, Dinas Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora, Kabupaten/Kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, Kantor Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang merupakan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, Disperindagkop & UKM

		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry dengan UMKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry dengan UMKM	x		x		x	x	BKPM	Dikpora, Dinas Indagkop
			Pengembangan peluang investasi bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang bisa dikelola oleh koperasi	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, Dinas Indagkop
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora, Pem Kab/Kota
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry di wilayah yang diprioritaskan Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	x			x			BKPM	Bappeda, Dikpora
			Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x		x		x		BKPM	KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry		x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry		x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, KADIN

FOKUS: EKONOMI KREATIF

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang industri kreatif	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor ekonomi kreatif.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif.	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM
		Land banking yang tersedia untuk usaha di bidang industri kreatif	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang industri kreatif	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM, Kantor Pertanahan
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi usaha di bidang industri kreatif	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Disperindagkop & UKM, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dalam industri kreatif	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)

			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan potensi dan peluang usaha di industri kreatif	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi usaha di bidang industri kreatif	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang industri kreatif yang berdaya saing tinggi di kawasan yang diprioritaskan	x			x			Bappeda	BKPM, Disperindagkop & UKM, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan industri kreatif	x	x	x	x	x	x	BKPM dan Bappeda	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, PemKab/Kota
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang industri kreatif (hulu - hilir, jenis industri, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan industri kreatif	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas Perindagkop, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Bappeda DIY, PemKab/Kota
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment).	Penyusunan pedoman bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Disperindagkop & UKM, Kantor Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	DinasPerindagkop, Kantor Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM
			Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan	x	x	x	x	x	x	BKPM	Disperindagkop & UKM, Kantor Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang industri kreatif yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Bappeda, Disperindagkop & UKM
			Optimalisasi keterkaitan bidang usaha industri kreatif besar dengan UMKMK	x		x		x	x	Disperindagkop & UKM	BKPM
			Pengembangan peluang investasi bidang usaha kreatif yang bisa dikelola oleh koperasi	x	x	x	x	x	x	Disperindagkop & UKM	BKPM
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang industri kreatif sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM, Dinas PU & ESDM & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha industri kreatif di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait	x		x		x		BKPM	Disperindagkop & UKM, KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata		x	x	x	x	x	BKPM	Disperindagkop & UKM, KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait		x	x	x	x	x	BKPM	Disperindagkop & UKM, KADIN

Tahun 2020-2025

FOKUS: PANGAN dan HASIL BUMI

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk permohonan izin di bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan,
		Land banking yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan,
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan,
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	x			x			BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda, PemKab/Kota, KADIN

			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota, KADIN
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, PemKab/Kota, KADIN
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pangan dan hasil bumi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pangan dan hasil bumi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota, KADIN
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan klaster bidang pangan dan hasil bumi yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota, KADIN
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain (hulu - hilir, jenis komoditas, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x			x			Bappeda dan BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota, KADIN
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dan berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan, skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x			x			BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, PemKab/Kota, KADIN
			Meninjau dan menyusun mekanisme money yang baru untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dan berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH

		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dan berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi yang inovatif yang merupakan UMKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar dengan UMKM	Penerapan dan pemantapan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan dan hasil bumi besar dengan UMKM	x		x		x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Disperindagkon & UKM
			Pengembangan peluang investasi bidang pangan dan hasil bumi besar dan berdaya saing tinggi yang bisa dikelola oleh koperasi/kelompok usaha kecil	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Disperindagkon & UKM
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain sesuai peraturan yang berlaku	Melaksanakan aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda, Kab/Kota, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x		x				BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Dinas PU & ESDM, Bappeda, Kab/Kota, KADIN
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	x		x				BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain		x	x	x	x		BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain		x	x	x	x		BKPM	Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN

FOKUS: INFRASTRUKTUR

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk permohonan izin di bidang usaha infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Kantpr Pertahanan
		Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi skala besar di sektor-sektor fokus yang lain	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi skala besar di sektor-sektor yang lain	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhanyang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
		Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan

		Pengembangan klaster wilayah dengan kebutuhan investasi sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pengembangan daya saing wilayah yang diprioritaskan	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan sektor infrastruktur yang berdaya saing tinggi, skala besar, dan mendukung daya saing daerah	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan(hulu - hilir, jenis komoditas, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan	x			x			Dinas PU & ESDM	BKPM, LH, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
			Menyusun mekanisme money untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			Dinas PU & ESDM	BKPM, LH, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, LH
		Pemberian pengakuan publik untuk investor di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	BKPM, LH, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di sektor infrastruktur skala besar yang menyerap/memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten/Kota

7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	x		x					BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	x		x					BKPM	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, KADIN
			Mengikuti pameran investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan		x	x	x	x			BKPM	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan		x	x	x	x			BKPM	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, KADIN

FOKUS: ENERGI

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk permohonan izin di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan
		Land banking yang tersedia untuk pengembangan sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk pengembangan sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	x		x		x		BKPM	Kantor Pertahanan, Kabupaten/Kota, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi dan yang terkait	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas PU & ESDM
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas PU & ESDM

2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			BKPM	Bappeda, Kabupaten/Kota
				x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas PU & ESDM, Kabupaten/Kota
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi, di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			Bappeda	BKPM, Kabupaten/Kota
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi yang berdaya saing tinggi Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan klaster bidang energi yang berdaya saing tinggi	x			x			Bappeda	BKPM, Kabupaten/Kota
				x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Kabupaten/Kota
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi (hulu - hilir, keterkaitan antarindustri, wilayah dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	x			x			Bappeda	BKPM, Kabupaten/Kota
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman pengembangan investasi energi alternatif skala besar yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan pengembangan investasi alternatif yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Kabupaten/Kota, Bappeda, LH
			Meninjau dan menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	Kabupaten/Kota, Bappeda, LH
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi dalam pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, LH, Kabupaten/Kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pengembangan energi alternatif skala besar yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	LH

5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk pengembangan energi skala besar yang melibatkan UMKMK atau menyerap tenaga kerja lokal, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Kabupaten/Kota
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di bidang energi dan energi alternatif skala besar yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, LH, Kabupaten/Kota
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi di wilayah yang diprioritaskan Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	x		x				BKPM	Kabupaten/Kota, Bappeda
			Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	x		x				BKPM	KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang investasi energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi		x	x	x	x		BKPM	KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi		x	x	x	x		BKPM	KADIN

FOKUS: KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk permohonan izin di bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan.	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)

		Land banking yang tersedia untuk bidang usaha pariwisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun DTW baru	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Badan Pertanahan
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pariwisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan DTW baru, DTW berbasis kebudayaan, atau meningkatkan daya saing DTW yang telah ada.	x			x			Dinas Pariwisata	BKPM, Bappeda, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata sesuai Perda no. 1/2013 (Ripparda)	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan yang terkait di kawasan pengembangan pariwisata	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi, sesuai Perda no. 1/2013 (Ripparda)	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata yang berdaya saing tinggi di kawasan pengembangan pariwisata	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan strategis pariwisata	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)

3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan strategis pariwisata	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang merupakan UMKMK. sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata, Disperindagkop & UKM
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata besar dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dengan UMKMK	x		x		x	x	Dinas Indagkop	BKPM, Dinas Pariwisata, Pokdarwis
			Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata yang bisa dikelola oleh koperasi/pokdarwis	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas Indagkop, Pokdarwis
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	x		x		x		BKPM	Dinas Pariwisata
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata		x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata

			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait		x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata
--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	------	------------------

FOKUS: PENDIDIKAN

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk permohonan izin di industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora
		Land banking yang tersedia untuk bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun usaha di bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora, Kantor Pertanahan
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x			x			Bappeda	BKPM, Dikpora
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dikpora, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan
2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x			x			Bappeda	BKPM, Dikpora
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry, isata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dikpora, Dinas PU & ESDM

		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x			x			BKPM	Dikpora
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang usaha yang terkait industri pendidikan dan knowledge-based industry	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang usaha yang terkait industri pendidikan/knowledge-based industry yang berdaya saing tinggi	x			x			BKPM	Dikpora
			Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dikpora, Pemkot/kab
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang usaha yang terkait industri pendidikan dan knowledge-based industry (hulu - hilir, jenis usaha, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x			x			Bappeda	BKPM, Dikpora
4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Dikpora, Dinas Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora, Kabupaten/Kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, Dinas Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, Disperindagkop & UKM
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry dengan UMKMK	x		x		x	x	BKPM	Dikpora, Dinas Indagkop

			Pengembangan peluang investasi bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang bisa dikelola oleh koperasi	x	x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, Dinas Indagkop
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dikpora, Pem Kab/Kota
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry	x			x			BKPM	Bappeda, Dikpora
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry	x		x		x		BKPM	KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry		x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry		x	x	x	x	x	BKPM	Dikpora, KADIN

FOKUS: EKONOMI KREATIF

No.	KEBIJAKAN	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim penanaman modal.	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk permohonan izin usaha di bidang industri kreatif	Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemkab/Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Peridagkop

		Land banking yang tersedia untuk usaha di bidang industri kreatif	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang industri kreatif	x		x		x		BKPM	Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM, Kantor Pertanahan
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi usaha di bidang industri kreatif	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait	x			x			Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM
			Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait	x	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Disperindagkop & UKM, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota
	2	Mendorong pesebaran penanaman modal.	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dalam industri kreatif	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan	x			x		BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
				Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
		Pengembangan potensi dan peluang usaha di industri kreatif	Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi usaha di bidang industri kreatif	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan	x			x		BKPM	Dinas Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)
				Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang industri kreatif yang berdaya saing tinggi di kawasan yang diprioritaskan	x			x		Bappeda	BKPM, Disperindagkop & UKM, Dinas PU & ESDM, PemKab/Kota
				Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemkab/Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan industri kreatif	x	x	x	x	x	Bappeda dan BKPM	Dinas Pariwisata, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, PemKab/Kota
3	Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang industri kreatif (hulu - hilir, jenis industri, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan industri kreatif	x			x			Bappeda	BKPM, Dinas Peridagkop, Dinas PU & ESDM, Dinas Perhubungan, Bappeda DIY, PemKab/Kota

4	Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>).	Penyusunan pedoman bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan	x			x			BKPM	Disperindagkop & UKM, Kantor Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme money untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	x			x			BKPM	DinasPerindagkop, Kantor Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	BKPM	Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	x	x	x	x	x	x	BKPM	Disperindagkop & UKM, Kantor Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang industri kreatif yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan yang	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan	x	x	x	x	x	x	BKPM	Bappeda, Disperindagkop & UKM
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha industri kreatif besar dengan UMKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar industri kreatif dengan UMKM	x		x		x	x	Disperindagkop & UKM	BKPM
			Pengembangan peluang investasi bidang usaha kreatif yang bisa dikelola oleh koperasi	x	x	x	x	x	x	Disperindagkop & UKM	BKPM
6	Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang industri kreatif sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemkab/Pemkot	x	x	x	x	x	x	Bappeda	BKPM, Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM, Dinas PU & ESDM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha industri kreatif di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Disperindagkop & UKM, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN
		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait	x		x		x		BKPM	Disperindagkop & UKM, KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata		x	x	x	x	x	BKPM	Disperindagkop & UKM, KADIN
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait		x	x	x	x	x	BKPM	Disperindagkop & UKM, KADIN
7	Meningkatkan promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	x			x			BKPM	Institusi Perizinan, Dinas Pariwisata, Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota, KADIN

		Pengembangan strategi promosi yang well-targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	x		x		x		BKPM	Dinas Pariwisata
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata		x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait		x	x	x	x	x	BKPM	Dinas Pariwisata

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA PROYEK	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-langkah Pemecahan Masalah
1.	<p>Depok Aerosport Base</p> <p>(i) Jenis Proyek: Pengembangan kawasan wisata berbasis wisata dirgantara</p> <p>(ii) Lokasi: Pantai Depok, Kabupaten Bantul</p> <p>(iii) Status: sudah ada Master Plan dan DED</p> <p>(iv) Bidang usaha: kawasan wisata</p>	<p>(i) Master Plan dan DED sudah tersedia</p> <p>(ii) Sudah ada kepastian pembangunan/perpanjangan landasan oleh Pemkab Bantul</p>	<p>(i) Belum ada kepastian kepemilikan lahan untuk pengembangan daya tarik dan fasilitas pariwisata di Depok untuk mendukung wisata dirgantara.</p> <p>(ii) Belum dibuatnya prospektus secara detil untuk pengembangan kawasan wisata berbasis wisata dirgantara.</p>	<p>(i) Kebijakan untuk memperjelas status tanah</p> <p>(ii) Strategi untuk memberikan kemudahan kepada para calon investor untuk menanamkan modalnya di kawasan wisata berbasis wisata dirgantara di Depok.</p> <p>(iii) Mengembangkan prospektus detil dan melakukan promosi kepada calon investor terkait dengan keberadaan kawasan wisata berbasis wisata dirgantara di Depok.</p> <p>(iv) Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan industri dan memberikan insentif untuk calon investor yang menanamkan modal di sektor utilitas.</p> <p>(v) Melakukan koordinasi kebijakan terpadu lintas sektor, terutama berkaitan dengan penguatan aksesibilitas dan pengembangan daya tarik/aktivitas wisata.</p>

NO	NAMA PROYEK	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-langkah Pemecahan Masalah
2.	<p>Kawasan Nglanggeran (Gunung Api Purba-Embung-Taman Buah)</p> <p>(i) Jenis Proyek: Peningkatan Daya Saing Daya Tarik Wisata Kawasan Nglanggeran</p> <p>(ii) Lokasi: Kab. Gunung Kidul</p> <p>(iii) Status: sudah ada Masterplan dan DED</p> <p>(iv) Bidang usaha: pengembangan daya tarik, atraksi wisata, layanan pendukung (rumah makan, homestay, dll).</p>	<p>(i) Masterplan dan DED sudah tersedia</p> <p>(ii) Proses Perizinan:</p>	<p>(i) Aksesibilitas yang masih kurang.</p> <p>(ii) Sarana dan fasilitas kepariwisataan yang masih terbatas (jalur trekking, fasilitas pengamanan untuk para pengunjung, sarana interpretasi dalam berbagai bahasa, warung/toko serba ada atau minimarket, tempat parkir)</p>	<p>(i) Mengembangkan prospektus yang spesifik untuk jenis-jenis investasi yang ditawarkan.</p> <p>(ii) Melakukan promosi kepada calon investor terkait.</p> <p>(iii) Melakukan koordinasi kebijakan terpadu lintas sektor untuk pengembangan infrastruktur.</p>
3.	<p>Tahura (Taman Hutan Rakyat)</p> <p>(i) Jenis Proyek: Pemanfaatan Tahura untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan</p>	<p>(i) Masterplan dan DED sudah tersedia</p>	<p>(i) Lahan kritis dan kelangkaan air</p> <p>(ii) Ketidaksetujuan masyarakat yang tinggal di lokasi pengembangan.</p>	<p>(i) Mengembangkan prospektus yang spesifik untuk jenis-jenis investasi yang ditawarkan.</p> <p>(ii) Melakukan promosi kepada calon investor, secara tepat sasaran.</p>

NO	NAMA PROYEK	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-langkah Pemecahan Masalah
	<p>menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.</p> <p>(ii) Lokasi: Bagian Daerah Hutan Playen di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>(iii) Status: sudah ada Masterplan dan DED</p> <p>(iv) Bidang usaha: pengembangan wisata alam (<i>eco tourism</i>).</p>	(ii) Proses Perizinan: Proses pengajuan izin/non izin sudah ditangani oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunung Kidul.	(iii) Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Pokok Pengelolaan dan sarana dan prasarana wisata alam	(iii) Melakukan koordinasi kebijakan terpadu lintas sektor untuk pengembangan infrastruktur.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19630826 198903 1 007